

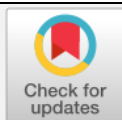
Menuju Kewirausahaan Sosial di Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

Muryanti Muryanti 

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 56281, Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi: newsyant@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Muryanti, M. (2020). Towards Social Entrepreneurship in the Village through Village-Owned Enterprises. *Society*, 8(1), 163-174.

DOI : [10.33019/society.v8i1.161](https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 17 Maret, 2020;
Diterima: 19 Mei, 2020;
Dipublikasi: 23 Juni, 2020;

ABSTRAK

Kewirausahaan sosial adalah konsep penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Konsep ini mengacu pada adanya dedikasi individu, yang memiliki karakter pemimpin, yang bekerjasama dengan masyarakatnya secara aktif, untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kewirausahaan sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Hasil observasi kemudian dianalisis, digabungkan dan diperkaya dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes merupakan sebuah lembaga di daerah pedesaan, yang memiliki peran yang penting dalam mendorong dan mendukung prinsip-prinsip kewirausahaan sosial di masyarakat pedesaan. Namun, berbagai kegiatan dan inovasi BUMDes belum memberikan perubahan signifikan bagi desa seperti peluang kerja bagi pemuda desa serta bermacam-macam kegiatan ekonomi di daerah pedesaan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Penguatan sistem sosial di desa diperlukan untuk mewujudkan kewirausahaan sosial secara komprehensif melalui kolaborasi aktif para pemimpin desa dan masyarakat. Pengelolaan dana desa oleh BUMDes perlu dilanjutkan dan dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: BUMDes; Dana Desa; Desa; Kewirausahaan Sosial

1. Pendahuluan

Pedesaan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Indonesia bisa mengembangkan potensi yang dimiliki melalui desa. Berkaitan hubungannya dengan masyarakat kota, desa mampu memberikan sumbangan pangan, energi, lingkungan, dan tenaga kerja produktif yang bermigrasi ke kota. Desa merupakan penggerak kota (Muryanti, 2018). Potensi besar ini, yang dapat dikembangkan, adalah karena banyaknya desa di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017, jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.957 desa (Abdulsalam, 2019). Dalam dua tahun terakhir, jumlah desa meningkat sebanyak 203 desa.

Desa memiliki potensi yang besar. Keberadaan desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, peraturan lain tentang potensi desa yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa merupakan suatu pemerintahan daerah terendah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri. Otonomi desa tidak terlepas dari asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki empat program prioritas untuk mempercepat pembangunan desa. Empat program prioritas tersebut adalah Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Embung Desa (penampungan air dalam skala besar), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk menjalankan empat program prioritas tersebut. Tahun 2019, pemerintah telah mengalokasikan Rp70 triliun untuk dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu dari empat program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Target utama program tersebut yakni adanya: (1) Sumber Daya Lokal; (2) Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif; (3) Penguatan Kapasitas dalam Manajemen Resiko Bencana; (4) Pelestarian Lingkungan Hidup, dan (4) Penguatan Tata Kelola Desa. BUMDes mendorong dan mendukung desa agar berdikari untuk mengembangkan potensi desa melalui badan usaha yang dimiliki.

Beberapa desa di Indonesia telah berhasil menggali potensi desanya sebagai upaya dalam pembangunan desa. Penelitian mendalam atas keberhasilan tersebut diperlukan untuk dijadikan sebagai percontohan, terutama dalam pengembangan BUMDes. Penelitian ini bertujuan mengkaji keberhasilan BUMDes di beberapa wilayah di Indonesia sebagai lembaga penggerak pembangunan desa dengan berfokus pada peran BUMDes dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di area pedesaan. Selain itu, BUMDes juga mampu mendorong kewirausahaan sosial masyarakat pedesaan, yang memang sudah terbentuk sebelumnya, sebagai karakter yang melekat pada masyarakat. Upaya BUMDes bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata bagi masyarakat pedesaan, akan tetapi lebih dari itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Misalnya, tersedianya lapangan pekerjaan dan menurunnya angka pengangguran di wilayah pedesaan menjadi sebuah nilai positif dari program dana desa.

2. Tinjauan Pustaka

Gregory Dees menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial berbeda dengan kewirausahaan bisnis (Puspitasari, 2019). Kewirausahaan sosial memiliki tujuan yang eksplisit berdasarkan pada sebuah gerakan yang didorong oleh semangat untuk menolong orang lain dan membuat perubahan untuk kebaikan bagi masyarakat. Wirausaha sosial adalah mereka yang memiliki pengetahuan modal (Sumber Daya Manusia), modal sosial, dan keterampilan sosial, yang mengubah masalah sosial menjadi inovasi sosial. Cara terbaik untuk mengukur kewirausahaan sosial bukan dengan menghitung jumlah keuntungan yang dihasilkan tetapi pada tingkat di mana kegiatan ekonomi juga menghasilkan nilai-nilai sosial. Selain itu, menurut Gregory Dess, kewirausahaan sosial adalah kombinasi dari antusiasme dalam kegiatan sosial, yang dikombinasikan dengan tekad, inovasi, dan disiplin, hampir sama dengan apa yang berkembang di dunia bisnis. Kegiatan kewirausahaan sosial tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana menggabungkan kegiatan mencari keuntungan dengan kegiatan yang bertujuan nilai sosial.

Kegiatan kewirausahaan sosial, pada tingkat individu, dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan pada tingkat kelompok, dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (Firdaus, 2014) dan menyelesaikan berbagai masalah sosial (pendidikan dan kesehatan). Kewirausahaan sosial adalah upaya untuk menemukan peluang dengan sumber daya kecil, tetapi memiliki semangat kerja keras yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwani et al., 2018). Menurut Abu-Saifan (2012), beberapa karakteristik kewirausahaan sosial adalah sebagai berikut: (1) kemampuan inovasi; (2) dedikasi tinggi; (3) keterampilan manajerial; (4) pemikiran strategis; (5) pemikiran holistik; (6) kemampuan kepemimpinan; (7) komitmen tinggi; (8) dapat mencari peluang; (9) pencipta; (10) memiliki konten bisnis, dan (11) gigih dalam berusaha.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari atau menafsirkan fenomena, yang dianalisis dari proses dan makna yang melekat pada peneliti. Penelitian ini berupaya untuk memunculkan berbagai makna dalam konteks yang berbeda, termasuk berbagai metode, yang mencakup pandangan interpretatif dan naturalistik dari subjek yang diteliti. Hasil penelitian kualitatif adalah proses pemaknaan dari pengalaman pribadi subjek penelitian sehari-hari (Denzin & Lincoln, 2009, p. 2).

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yang diperoleh melalui koran, baik koran online atau koran cetak, yang mengulas tentang keberhasilan-keberhasilan desa yang mendapatkan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari observasi di desa-desa yang sukses dalam usaha dan manajemen BUMDes. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling mendasar dalam penelitian dalam mengambil tindakan dan menafsirkan suatu peristiwa dan implikasinya. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran umum dan pengetahuan tentang budaya masyarakat, yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara atau untuk memperkaya data yang diperoleh dari wawancara. Observasi merupakan proses mencatat suatu peristiwa dengan menggunakan instrumen serta merekamnya untuk tujuan penelitian (Denzin & Lincoln, 2009, p. 523).

Observasi dijalankan dengan cara mengamati berbagai kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes di beberapa desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang telah berhasil dalam mengembangkan BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan infrastruktur desa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa,

pengembangan desa wisata, unit bisnis yang beragam dan dikelola secara mandiri, atau pengembangan konsep desa pintar (*smart village*), dan penggunaan teknologi di antara masyarakat untuk memecahkan masalah di desa.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Peran BUMDes di Pedesaan

BUMDes adalah salah satu perwujudan dari implementasi undang-undang, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam pada skala desa, yang sejalan dengan sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Surono, 2017). BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat (Agunggunanto *et al.*, 2016). Keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara bersama menjadi sejalan dengan konsep kewirausahaan sosial.

BUMDes didirikan, dikelola, dan dikembangkan oleh desa. Desa juga memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BUMDes, dan pengawas program BUMDes (Chintary & Lestari, 2016). Modal awal BUMDes, secara keseluruhan, adalah milik desa. Namun di beberapa desa, Pemerintah Desa dan masyarakat berinvestasi di BUMDes, dengan persentase 51:49 (Ridwan, 2014). Modal BUMDes tersebut menjadi aset desa yang dikelola dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Astuti & Warsito, 2017). Dalam pengelolaan BUMDes, ada pemisahan untuk layanan, manajemen aset, dan pengembangan bisnis, yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Winarto, 2017).

BUMDes memiliki peran penting untuk menjaga semangat gotong royong dalam pengembangan identitas bangsa. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Rika Fatimah di 61 desa di bagian barat Indonesia, menunjukkan bahwa pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat penting untuk dilakukan karena dapat menciptakan keunggulan kompetitif, kolaboratif dan adaptif, untuk kesejahteraan desa berkelanjutan dengan syarat melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan karakter desa (Kompas.id, 2018a). Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi di desa dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Faedlulloh, 2018). BUMDes membawa perubahan sosial dan ekonomi di desa, tidak langsung ke rumah tangga, tetapi lebih secara makro dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Hal ini sejalan dengan pembangunan di daerah pedesaan yang memiliki prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di tingkat desa (Anggraeni, 2016).

BUMDes juga memiliki peran penting dalam menjalankan proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menjadi stabilisator, modernisator, inovator, dan mengurangi pengangguran (Darwita & Redana, 2018). Namun, di masa depan, pembangunan ekonomi keluarga perlu diprioritaskan, ketika BUMDes telah mampu meningkatkan ekonomi pedesaan secara makro.

Kinerja BUMDes dipengaruhi oleh: (1) tata kelola kelembagaan sebagai kunci utama keberhasilan. Kinerja BUMDes merupakan kerja kolektif yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem kerja desa yang saling terkait; (2) keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh jangkauan dan skala usaha, yang bisa bertahan karena melayani kebutuhan lokal masyarakat lokal; (3) BUMDes, yang tumbuh dan berkembang berlandaskan kearifan dan solidaritas lokal lebih kuat dan kokoh dalam keberlanjutan organisasi dibandingkan dengan unit usaha komersial (Diartho, 2017).

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan ekonomi di desa, salah satunya adalah pengelolaan produksi tahu yang difasilitasi oleh pemangku kepentingan. Pengelolaan

limbah cair tahu dan pemanfaatan biogas berjalan dan berkelanjutan saat ini dengan menggunakan teknologi. Proses pengelolaan diubah karena sebelumnya proses tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak mempertimbangkan analisis kelayakan ekonomi (Shaffitri *et al.*, 2016).

Kegiatan lain yang dikembangkan oleh BUMDes beragam. Beberapa unit bisnis yang telah dikembangkan termasuk warung serba ada atau waserda disertai dengan mengakomodasi produksi asli desa (Darwita & Redana, 2018), pengembangan pasar desa, pengembangan koperasi yang menjual barang grosir dan eceran, unit simpan pinjam melalui koperasi, pengembangan pariwisata desa, pengembangan pertanian-industri-transportasi, serta membantu industri rumah tangga, agro-industri atau perikanan darat (Ridlwan, 2014), pengelolaan air bersih, pembangunan infrastruktur desa, memberikan bantuan kepada kelompok bisnis industri rumah tangga, penyewaan truk mixer (Winarto, 2017). Di beberapa desa, BUMDes menjalankan berbagai kegiatan berbasis Islam. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara keseluruhan, dengan mempromosikan rasa kekeluargaan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariah Islam (Pradesyah & Albara, 2018). Kegiatan ekonomi berbasis syariah terdiri dari simpan dan pinjam tanpa bunga, tetapi hanya membayar bagi hasil sesuai dengan hasil operasi.

Kegiatan ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di desa dengan perputaran uang yang lebih cepat. Pada tingkat individu, keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan membuka peluang bisnis bagi setiap individu untuk mengembangkan produk mereka dengan cara yang inovatif dan kreatif. Di tingkat masyarakat, BUMDes dapat menciptakan pekerjaan baru atau memperbaiki pekerjaan yang ada menggunakan teknologi yang menarik kaum muda. Peluang kerja ini dapat mengurangi pengangguran di daerah pedesaan. Perubahan yang terjadi pada tingkat individu, kelompok, dan masyarakat adalah bentuk konsep kewirausahaan sosial yang tumbuh di desa.

Saat ini, BUMDes telah diposisikan sebagai lembaga ekonomi desa yang memiliki peran dalam kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa dan desa. BUMDes yang dikelola dengan baik akan mendukung ekonomi lokal, regional dan nasional. BUMDes sebagai lembaga baru di daerah pedesaan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, namun proses implementasi masih memiliki beberapa masalah yang perlu diselesaikan di masa depan. Beberapa masalah yang dialami oleh BUMDes, termasuk kualitas layanan, manajemen organisasi, kurangnya jenis bisnis, dan rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam manajemen BUMDes (Agunggunanto *et al.*, 2016). Dengan demikian, dalam proses pengembangan BUMDes, harus melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya aparat desa, dengan menjadi anggota/pemilik BUMDes, sebagaimana diterapkan dalam sistem ekonomi koperasi (Faedlulloh, 2018).

Sangat perlu untuk melakukan pengawasan oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dengan tujuan memenuhi hak desa untuk sumber daya alam pada skala desa. Dalam implementasinya, perlu diatur ketentuan teknis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dan memberikan panduan kepada desa (Surono, 2017). Di tingkat lokal, pemerintah desa memiliki peran yang kuat dalam mengelola BUMDes sebagai pengawas dan pembuat keputusan. Kualitas layanan dan manajemen organisasi BUMDes perlu ditingkatkan dan pekerja profesional diperlukan untuk menjadikan BUMDes lembaga profesional (Anggraeni, 2016).

Pengawasan internal dan eksternal terhadap BUMDes dapat dilakukan. Kontrol internal dilakukan oleh Badan Pengawas, sedangkan kontrol eksternal dilakukan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat. Badan Pengawasan, dalam melakukan pengawasan, menggunakan data administrasi secara berkala sesuai dengan program kerja tahunan. Badan Pemberdayaan Masyarakat hanya berperan dalam proses awal pendirian dan fasilitasi BUMDes dengan program pemerintah. Dalam implementasinya, peran kedua pengawas belum optimal dan membutuhkan koordinasi yang baik untuk meningkatkan BUMDes dalam memberdayakan dan berkontribusi pada pembangunan desa (Astuti & Warsito, 2017). Meningkatkan pemberdayaan dan ketersediaan pekerjaan sebagai hasil dari kinerja BUMDes tentunya dapat meningkatkan kewirausahaan sosial di desa.

4.2. Kewirausahaan Sosial melalui BUMDes di Desa

Kegiatan-kegiatan BUMDes merupakan pelaksanaan konsep kewirausahaan sosial untuk mengembangkan potensi desa. Selain menghasilkan manfaat ekonomi, BUMDes juga berperan sebagai forum komunikasi, menjaga motivasi untuk bekerja, forum pemberdayaan dan forum untuk meningkatkan solidaritas bagi masyarakat pedesaan. BUMDes juga memiliki peran untuk menciptakan inovasi untuk mengurangi pengangguran. BUMDes membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan mengembangkan sumber daya alam dan manusia di desa.

Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, salah satu desa yang telah berhasil menerapkan konsep kewirausahaan dalam pengelolaan dana desa. Desa ini dikenal sebagai desa mandiri. Dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat hanya digunakan sebagai pendanaan pendukung untuk pengembangan desa. Dengan kata lain, pengembangan desa menggunakan sumber-sumber pendanaan mandiri desa.

Desa ini dengan populasi 1.500 keluarga (sekitar 5.000 jiwa) memiliki potensi unggul dari produksi pertanian. Tanaman pokok tidak jauh berbeda dengan desa lain yang terdiri dari padi dan palawija. Sedangkan tanaman komersial ditanam oleh petani yang memberikan banyak keuntungan adalah semangka kuning dan merah. Luas tanam semangka adalah 374.452 hektar. Dengan luas tanam seperti itu, tentu saja petani mendapat untung maksimal di musim panen.

Selain itu, kegiatan masyarakat Desa Latukan semakin dinamis dengan berbagai jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes (Kompas.id, 2018b). BUMDes di Desa Latukan memiliki perusahaan air minum, program ternak berkala, jasa perbaikan dan penyewaan alat produksi pertanian seperti mesin tanam, mesin panen, dan traktor. Sumber air bersih dari Air Bawah Tanah (ABT) dan dari Sungai Bengawan Solo, yang diproses menggunakan Instalasi Penjernih Air (IPA). Air yang berasal dari sungai ditampung ke dalam kolam penampungan air lalu diproses menggunakan Instalasi Penjernih Air (IPA) kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Masyarakat membayar Rp1.200 per meter kubik (m³) dalam menggunakan layanan ini. BUMDes mendapat keuntungan dari bisnis ini Rp1.250.000 per bulan.

BUMDes juga mengelola pasar desa dan menjual produk-produk unggulan untuk usaha kecil dan menengah dalam bentuk makanan ringan dengan bahan dasar jantung pisang. Kemudian, jantung pisang diolah oleh masyarakat menjadi keripik, tongkat, jenang (bubur disajikan dengan gula merah atau santan) dan es krim. Pasar desa memiliki 67 kios pedagang kecil, dengan biaya retribusi Rp500 per pedagang. Pendapatan dari retribusi memberikan manfaat bagi desa sebesar Rp3.000.000/bulan. Pinjaman modal dibatasi hingga Rp3.000.000 untuk setiap pedagang, yang dialokasikan untuk 200 pedagang dan masyarakat setempat. Khusus untuk usaha kecil dan menengah, pinjaman modal harus dikembalikan dalam waktu 110 hari. Aset pasar desa mencapai Rp110.000.000 dan total kredit macet Rp30.000.000.

BUMDes di Desa Latukan tidak hanya mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, mengembangkan potensi desa, dan meningkatkan omset desa, tetapi juga menjual produk Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kios BUMDes yang terletak di dekat Kantor Desa. BUMDes juga bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan untuk menyediakan jasa penyewaan peralatan pertanian. Manajemen peralatan produksi pertanian memberikan kontribusi pendapatan ke desa sebesar Rp.33.000.000/tahun atau 20% dari omset jasa sewa dan perbaikan.

Dana desa yang diterima oleh Desa Latukan sebesar total Rp283.000.000 pada tahun 2015. Tahun 2016, dana desa yang diterima sebesar total Rp634.000.000. Tahun 2017, Dana desa yang diterima sebesar Rp809.000.000. Pengelolaan potensi desa dilakukan dengan berbagai kegiatan produktif dan telah mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp2,57 miliar. Hasil ini adalah sekitar setengah dari total pendapatan Rp1,46 miliar dari berbagai sumber pendanaan yang diterima seperti dana desa dan bagi hasil dari pajak dan retribusi dari kabupaten.

Pemerintah Desa juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pinjaman untuk usaha ternak kepada petani. Pada tahun 2016, pinjaman usaha ternak kambing mencapai Rp52.500.000, dengan ketentuan satu orang mendapat pinjaman sebesar Rp3.500.000, yang tersebar di 15 Rukun Tetangga (RT) masing-masing 1 orang. Uang pinjaman yang dapat dikembalikan sebesar 80%. Kambing dibeli oleh penduduk desa tersebut sebesar Rp2.000.000 per kambing. Di desa ini terdapat 85 peternak sapi potong, 55 peternak kambing dan komoditas perikanan (nila 2,4 ton/tahun, lele 1 ton/tahun, dan bandeng 13 ton/tahun). Keragaman kegiatan usaha petani meningkatkan perputaran dana desa yang dikelola oleh BUMDes (Kompas.id, 2018b).

Kewirausahaan sosial di Desa Latukan dapat dilihat dari aktivitas BUMDes yang melakukan pembangunan ekonomi di desa tersebut. Berbagai jenis kegiatan ini mampu mendorong perekonomian di daerah pedesaan pada tingkat individu, kelompok, atau masyarakat desa. Pada level individu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada level kelompok terdiri dari kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat di desa-desa yang bekerja bersama dengan BUMDes, seperti Gapoktan, Karang Taruna, Dasawisma, atau Posyandu, sebagai kegiatan kolektif dalam mewujudkan nilai-nilai sosial. Pada level masyarakat, secara keseluruhan, dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan, yang dihasilkan dari kegiatan kewirausahaan sosial pada tingkat individu dan kelompok.

Kegiatan ekonomi dan kewirausahaan sosial di Desa Latukan merupakan suatu keberhasilan pengelolaan dana desa, yang salah satu pengelolaannya dilakukan melalui BUMDes. Dalam konteks yang berbeda, desa-desa berikut berhasil mendorong kegiatan ekonomi desa dan mampu memperkuat kewirausahaan di desa.

1) Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur (Kompas.id, 2018c).

A. Pembangunan Ekonomi

- a) Pengembangan ekowisata *mangrove* (bakau) dan pembuatan foto spot untuk wisatawan.
- b) Pengembangan kawasan wisata Pulau Nyamuk (Gili Grasakan).
- c) Pengembangan kuliner hasil laut (kare rajungan, lobster, kelo (asem-asem) ikan sembilang, dan ikan bakar) di dekat dermaga.
- d) Acara Berkala seperti Festival Muara Bengawan Solo (panjat pinang, balap dayung, perahu hias, layang-layang).

- e) Pengembangan acara budaya Pemilihan Duta Wisata *Reang* (laki-laki) dan *Eson* (perempuan).
- B. Kewirausahaan Sosial
 - a) Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
 - b) BUMDes memiliki unit bisnis simpan pinjam serta layanan pembayaran dan transfer untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.
- 2) Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat ([Kompas.id, 2018d](#))
 - A. Pembangunan Ekonomi
 - a) Pengembangan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes) yang menghasilkan air yang bersih dan hemat dibandingkan dengan jika menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari.
 - b) Penjualan air minum dalam kemasan merek MAKMUR-QUA.
 - c) Pembukaan BUMDes Mart, yang menampung produk hasil kreativitas masyarakat desa (aneka produk ubi jalar).
 - d) Pengelolaan sewa atas lahan desa melalui lelang kepada masyarakat dengan luas lahan yang disewa maksimal 1 hektar.
 - e) Pengembangan peternakan kambing.
 - f) Pembangunan kawasan wisata arung jeram di Sungai Cimanis sepanjang 3 km.
 - g) Pengelolaan sampah rumah tangga oleh pemerintah desa.
 - B. Kewirausahaan Sosial

Pengelola BUMDes yang diantaranya pengembangan desa wisata, perusahaan air minum desa, pengelolaan sampah rumah tangga desa dan BUMDesMart dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
- 3) Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ([Kompas.id, 2018e](#))
 - A. Pembangunan Ekonomi
 - a) Pembangunan Taman Eden dengan tanaman hortikultura, palawija, tanaman kopi, kemiri, kelapa, pinang, nangka, dan mangga di sepanjang jalan desa yang gersang dapat menghijaukan desa dan sekaligus memberikan hasil ekonomi.
 - b) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (pompa sumur bor, selang, keran air, pembangunan kandang sapi, pembangunan gudang pertanian) serta pembelian alat pertanian (mesin giling jagung dan mesin parut kelapa).
 - c) Pembangunan infrastruktur jalan desa untuk memperlancar aktivitas ekonomi.
 - d) Pengembangan BUMDes untuk menggerakkan ekonomi desa dengan cara membeli tenda berpindah, kursi plastik, lampu bohlam, dan kios alat-alat pertanian.
 - B. Kewirausahaan Sosial
 - a) Taman Eden merupakan upaya inovatif dari pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dalam budidaya pertanian secara kolektif (penggunaan lahan desa yang disewakan untuk kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama).
 - b) Proyek padat karya dalam pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.
 - c) Mengurangi pengangguran dengan pengembangan BUMDes melalui berbagai bisnis pertanian.

- 4) Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur ([Kompas.id, 2018f](#))
 - A. Pembangunan Ekonomi
 - a) Pembangunan ekowisata dan arboretum dari hutan bambu dan embung untuk pertanian untuk menjaga sumber air pertanian dan sumber air bersih.
 - b) Objek wisata pada embung pertanian berupa danau buatan (kolam renang, sepeda air dan perahu kecil).
 - c) Arboretum bambu adalah wahana pendidikan karena keanekaragaman spesies bambu yang ditanam, yang berasal dari semua daerah di Indonesia dan menjadi sumber air untuk menjaga keseimbangan ekologis, air minum sehari-hari, dan irigasi.
 - d) Pembangunan infrastruktur desa, yang mencakup drainase, tembok penyangga jalan, plat duiker, gorong-gorong dan rabat beton
 - B. Kewirausahaan Sosial
 - a) Pembangunan infrastruktur yang padat karya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di desa.
 - b) Pengembangan Arboretum dan Ekowisata mampu mendorong tenaga kerja kreatif di desa untuk mengembangkan pariwisata.
 - c) Lapangan pekerjaan baru hasil pengembangan pariwisata terkait dengan industri rumah tangga dan kewirausahaan.
- 5) Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ([Kompas.id, 2018g](#))
 - A. Pembangunan Ekonomi
 - a) Budidaya padi lokal varietas Karang Dukuh dan Siam Unus.
 - b) Budidaya tanaman Jeruk Siam Banjar. Buah hasil panen kemudian diolah dan dijadikan produk es krim yang akan dijual melalui BUMDes.
 - c) Pengembangan unit usaha simpan pinjam BUMDes dan penyediaan modal kepada petani untuk budidaya padi lokal pada saat musim tanam dan dilunaskan kembali oleh petani pada saat musim panen.
 - d) Berbagai bisnis yang dikembangkan oleh BUMDes diantaranya jual dan beli gabah, layanan penyediaan air bersih, pengelolaan gedung serbaguna, penggemukan sapi, dan produksi es krim jeruk.
 - B. Kewirausahaan Sosial
 - a) Aneka usaha yang dikembangkan oleh BUMDes dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di desa.
 - b) Budidaya tanaman lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kreativitas petani dengan tujuan untuk menambah pendapatan.

Desa-desanya tersebut merupakan contoh terbaik untuk desa, yang telah berhasil dalam mengelola dana desa, yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan desa. Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan desa, yang dalam pengelolaannya dilakukan dengan cara mendirikan lembaga BUMDes. Pembangunan desa dilakukan melalui kegiatan yang beragam, diantaranya pengembangan wisata desa dan kuliner, pengelolaan sumber daya air, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, pengelolaan sumberdaya desa, pembangunan infrastruktur serta pengelolaan aneka usaha.

Pembangunan ekonomi desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan lembaga desa, akan tetapi untuk mengembangkan kewirausahaan sosial di desa. Tumbuhnya konsep kewirausahaan sosial dikarenakan mekanisme solidaritas masyarakat di pedesaan masih tergolong tinggi dibandingkan dengan masyarakat kota. Hal ini berimplikasi pada munculnya gerakan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Meningkatnya aktivitas pembangunan desa menyebabkan berkurangnya aktivitas migrasi dari desa ke kota karena tersedianya lapangan pekerjaan yang menarik minat pemuda-pemudi di desa, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang meningkat, dan kreativitas dalam mengembangkan berbagai macam usaha. Namun demikian, jika hal itu mengacu pada konsep kewirausahaan sosial, peningkatan pembangunan desa tersebut belum signifikan. Itu baru mencakup sebagian kecil dari konsep kewirausahaan sosial yang bisa diterapkan di desa.

Konsep kewirausahaan sosial terdiri dari (1) pengetahuan, modal sosial, dan keterampilan sosial yang dapat menyelesaikan masalah sosial menjadi inovasi sosial; (2) kegiatan sosial yang berpadu dengan keteguhan, inovasi, dan disiplin; (3) menemukan peluang dengan sumberdaya yang minim yang disertai semangat kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) karakter-karakter inovator, disiplin, memiliki dedikasi tinggi, pencipta, dan kepemimpinan belum bisa dilakukan di desa melalui program ini. Beberapa alasan penyebabnya karena pelaksanaan program ini masih dalam waktu yang singkat (kurang lebih 5 tahun), sasaran program atau kegiatan masih dalam jangka yang pendek (belum berkelanjutan untuk jangka panjang), program kegiatan bersifat pragmatis (menekankan pada kegiatan yang produktif dalam jangka pendek daripada pengembangan program peningkatan kualitas SDM di desa dalam jangka panjang), pengembangan karakter kewirausahaan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam program ini belum signifikan karena lebih banyak keterlibatan aparat desa dibandingkan dengan masyarakat desa.

5. Kesimpulan

Berbagai kegiatan yang didanai dari dana desa adalah tahap awal dalam proses pengembangan kewirausahaan sosial di desa. Diperlukan program berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan kegiatan. Mengembangkan kewirausahaan sosial adalah proses yang panjang dan terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah pedesaan. Inovasi, pengawasan, dan keberlanjutan program perlu dilakukan agar dapat mencapai target.

Kewirausahaan sosial di desa dapat dikembangkan karena pada dasarnya masyarakat desa memiliki karakter kesadaran kolektif yang kuat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kolektivitas selalu dapat dipertahankan jika sistem sosial di desa mendukungnya. Kewirausahaan sosial di desa, pada dasarnya, tinggal memerlukan dorongan dikarenakan sumberdaya yang sudah tersedia. Dana desa yang dikelola oleh BUMDes merupakan salah satu dorongan untuk menguatkan kewirausahaan sosial. Upaya awal yang progresif harus disadari sebagai sebuah peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa mempengaruhi sistem sosial nasional.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan bantuan dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdulsalam, H. (2019, March 25). *Saat Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa Demi Dapat Dana Desa*. Retrieved from <https://tirto.id/saat-banyak-kelurahan-ingin-jadi-desa-demi-dapat-dana-desa-dj6y>
- Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. *Technology Innovation Management Review*, 2(2), 22-27. <https://doi.org/10.22215/timreview/523>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67-81. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155-167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Astuti, P., & Warsito, W. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 291-300. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16127>
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 59-63. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/244>
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus*, 9(1), 52-60. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/79>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan ed.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Diartio, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2), 200-218. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1801>
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Firdaus, N. (2014). Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial. *Jurnal ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 55-67. <https://doi.org/10.14203/JEP.22.1.2014.69-81>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *INFORMASI APBN 2019*. Direktorat Jenderal Anggaran. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/11226/buku-informasi-apbn-2019.pdf>
- Kompas.id. (2018a, September 17). Desa Simpan Potensi Besar. Retrieved from <https://kompas.id/baca/utama/2018/09/17/desa-simpan-potensi-besar/>
- Kompas.id. (2018b, April 25). Menggali Semua Potensi Ekonomi Desa. Retrieved from <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/04/25/menggali-semua-potensi-ekonomi-des/>
- Kompas.id. (2018c, January 17). Menjual Pesona Muara Bengawan Solo. Retrieved from <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/01/17/menjual-pesona-muara-bengawan-solo/>
- Kompas.id. (2018d, March 28). Kreativitas Warga Memperbaiki Nasib. Retrieved from <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/03/28/kreativitas-warga-memperbaiki-nasib/>
- Kompas.id. (2018e, March 14). Bangun Hidup Dari Dana Desa. Retrieved from <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/03/14/bangun-hidup-dari-dana-des/>

- Kompas.id. (2018f, May 9). Arboretum Bambu Dari Sanankerto. Retrieved from <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/05/09/arboretum-bambu-dari-sanankerto/>
- Kompas.id. (2018g, July 17). Nilai Tambah Produk Unggulan Desa. Retrieved from <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/07/17/nilai-tambah-produk-unggulan-desa/>
- Muryanti, M. (2018). *Pedesaan dalam Putaran Zaman: Kajian Sosiologis Pedesaan, Petani dan Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pradesyah, R., & Albara, A. (2018). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 156-164. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/2476>
- Purwani, D. A., Partini, P., & Wastutiningsih, S. P. (2018). Tantangan Sociopreneurs Yogyakarta Di Era Communication 3.0. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 12-25. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1420>
- Puspitasari, D. C. (2019, September). *Kewirausahaan Sosial: Dalam Konsep Dan Terapan*. Diskusi Umum. Yogyakarta, Indonesia.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Shaffitri, L. R., Syaikat, Y., & Ekayani, M. (2016). Peranan BUMDes dalam Pengelolaan Limbah Cair Tahu dan Pemanfaatan Biogas. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 2(2), 136-143. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10984>
- Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 459-478. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/195>
- Winarto, B. (2017). *Peranan Bumdes "Mandiri" Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro* (Doctoral Dissertation). Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Retrieved from <http://eprints.umpo.ac.id/3615/>

Tentang Penulis

Muryanti, memperoleh gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia.
E-Mail: newsyant@yahoo.com